



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

# Proyek Jalan Air Selimang Juga Jadi Temuan BPK

**KEPAHIANG** - Sejumlah proyek fisik seperti pengerjaan jalan, tak luput dari catatan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Seperti, pengerjaan paket jalan di Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang. Ada kelebihan pembayaran pada pekerjaan rekonstruksi jalan hotmik paket 1 sebesar Rp287.218.292,24 yang disebabkan adanya kekurangan volume pekerjaan.

Lalu, pekerjaan jaan hotmix Air Selimang Rp253.903.167,65, yang juga disebabkan kekurangan volume pekerjaan.

Serta, pekerjaan rekonstruksi jalan Desa Talang Tige dan pekerjaan pembangunan/penyediaan sub sistem limbah pengelolaan setempat di Kecamatan Seberang Musi.

Atas temuan tersebut, Komisi III DPRD Kepahiang sebagai mitra kerja telah memberi sejumlah catatan.

Diantaranya, meminta bupati menginstruksikan seluruh OPD dengan catatan dalam LHP BPK untuk menjalankan seluruh rekomendasi yang dikeluarkan BPK.

Meminta bupati menginstruksikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih hati-hati melakukan verifikasi anggaran agar tak terjadi kesalahan dalam menempatkan jenis belanja.

Kemudian, meminta bupati agar menginstruksikan BKD khususnya bagian pendapatan daerah mengidentifikasi dan mendata kembali objek dan subjek pajak reklame yang selama ini belum

dijadikan sumber pendapatan daerah seperti reklame melalui videotron.

Komisi III juga meminta bupati menginstruksikan segera dilakukan penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap beberapa temuan kerugian negara yang harus dikembalikan.

Serta, meminta bupati meningkatkan kinerja Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat daerah untuk mencegah terjadinya temuan BPK di tahun berikutnya.

Pengawasan internal juga diminta dilakukan secara menyeluruh ke seluruh OPD, baik untuk pendapatan maupun untuk belanja sebelum dilakukannya audit eksternal oleh BPK RI.

Terkait temuan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepahiang ini, Sekda Kepahiang DR. Hartono sebelumnya berkeyakinan temuan BPK terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Kepahiang, kelar tahun ini. Dengan total temuan mencapai Rp21 miliar, progres pengembalian diklaim sudah diangka 60 persen.

Adapun nilai pengembalian yang sudah dilakukan, diperkirakan masih di kisaran Rp10 miliaran. "Pengembalian sesuai dengan dengan catatan BPK terus berproses," kata Sekda.

Lantas, bagaimana jika pejabat terkait tak memiliki uang cukup untuk melunasi TGR?

Mengacu pada peraturan BPK No 3 tahun 2007, pada pasal 33 telah dijelaskan apabila pejabat terkait tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50 persen dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

Jika pejabat terkait memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen

yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Diketahui, temuan BPK TA 2023 terjadi hampir di seluruh OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang.

Seperti di Dinkes kepahiang, dengan item temuan belanja makan minum rapat dengan status laporan tidak senyatanya sebesar Rp122.178.500. Hasil temuan BPK menunjukkan bahwa jumlah pembelian makanan dan minuman tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada nota pembelian.

Lalu, di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang. Di sini, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak Rp186.771.482 tercatat dengan kelebihan pembayaran dengan bahan cetak tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah.(oce)